

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal

“Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja (*labour market*). Teori ini menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Teori sinyal secara luas digunakan dalam studi-studi akuntansi, *auditing*, dan manajemen keuangan yang menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal tentang perusahaan lewat berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan yang dapat dilihat sebagai sinyal oleh investor. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020).

“*Signalling theory* kemudian dikembangkan oleh Ross tahun 1977, yaitu adanya asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poor-informed*)” (Purba, 2023). “Tujuan teori sinyal adalah untuk mengurangi masalah asimetri informasi dengan menyediakan lebih banyak informasi kepada investor” (Onasis & Jasman, 2025). “Pihak investor yang menerima informasi akan menginterpretasikan dan menganalisis informasi yang diterima, kemudian informasi tersebut akan menjadi kabar baik (*good news*) atau kabar buruk (*bad news*)” (Marta & Taqwa, 2024). “Kabar baik yang diberikan perusahaan dapat berupa kondisi perusahaan yang baik, pengumuman laba, dan pembagian dividen” (Wijaya & Suhendah, 2023). Menurut Prasetyo et al. (2021),

“informasi laba merupakan sinyal positif berupa kabar baik, yang senantiasa ingin disampaikan perusahaan kepada publik dengan harapan pasar segera bereaksi setelah pengumuman laba disampaikan. Reaksi pasar bergantung pada kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Karena laba dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan, sehingga laba dikatakan memiliki *information content*”. “Laba juga menjadi pertimbangan untuk para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sehingga diharapkan agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang persisten serta meningkat setiap tahunnya” (Januandika et al., 2025). “Kenaikan dan penurunan laba dapat memberikan sinyal yang baik apabila pergerakan fluktuasi laba cenderung stabil. Sebaliknya, apabila laba yang tercermin di laporan keuangan menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif tajam, maka ini menunjukkan sinyal buruk yang ditangkap oleh pengguna laporan keuangan” (Mandiri & Sebrina, 2023).

“Laba dikatakan persisten apabila laba tidak berfluktuatif serta dapat mencerminkan keberlanjutan laba dimasa yang akan datang atau dalam jangka panjang” (Pratomo & Nuraulia, 2021). “Persistensi laba dapat menjadi sinyal keberlanjutan laba perusahaan pada periode berikutnya bagi investor dan kreditor” (Setyaningrum & Ridarmelli, 2021) dalam (Manggalawati & Hardiningsih, 2024). “Ketika laba yang dihasilkan dapat mencerminkan laba yang berkelanjutan (*sustainable earnings*), investor akan lebih tertarik untuk menanamkan uangnya di perusahaan dan kreditor juga merasa lebih aman untuk meminjamkan uang kepada perusahaan” (Rohit & Suhendah, 2021). “Persistensi laba berperan penting dalam menyediakan informasi yang andal bagi pengambil keputusan ekonomi, misalnya untuk perencanaan investasi maupun penyusunan kontrak oleh para pemangku kepentingan” (Abdillah et al., 2021) dalam (Januandika et al., 2025).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI (2024) dalam PSAK 201, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas”. “Laporan keuangan berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai keseluruhan kinerja perusahaan yang akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan” (Pratomo & Nuraulia, 2021). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “laporan Keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi”:

(a) “Aset;”

“*Asset* adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Aset terdiri dari *current assets* dan *non-current assets*. *Current assets* adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau satu siklus operasional, mana yang lebih lama. Sedangkan, *non-current assets* adalah aset yang tidak memenuhi definisi dari *current assets* atau aset yang tidak diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan oleh bisnis dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasional” (Kieso et al., 2024).

(b) “Liabilitas;”

“Liabilitas (*liabilities*) merupakan tuntutan dari pihak kreditor yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan” (Weygandt et al., 2022).

(c) “Ekuitas;”

“Ekuitas (*equity*) merupakan hak kepemilikan atas seluruh aset perusahaan, yaitu selisih total aset dikurangi total kewajiban” (Weygandt et al., 2022).

(d) “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;”

“Pendapatan (*revenues*) diperoleh dari penjualan barang, penyediaan jasa, penyewaan properti, dan pemberian pinjaman. Sedangkan beban (*expenses*) adalah biaya atas aset yang digunakan atau jasa yang telah dimanfaatkan dalam upaya memperoleh pendapatan” (Weygandt et al., 2022).

- (e) “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan”
- (f) “Arus kas”

“Terdapat dua kelompok besar pengguna informasi keuangan” (Weygandt et al., 2022):

1. “*Internal Users*”

“*Internal users* atau pengguna internal informasi akuntansi adalah para manajer yang membuat perencanaan, mengelola, dan menjalankan bisnis. Termasuk di dalamnya, manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan”.

2. “*External Users*”

“*External users* atau pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor. Investor (*owner*) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan investasi, seperti *buy*, *hold*, atau *sell* saham kepemilikannya. Kreditor (seperti *supplier* dan *bankers*) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau meminjamkan uang”.

“Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada karakteristik kualitatif yaitu mudah dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. contohnya, investor memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan” (Maulita & Framita, 2021). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “laporan keuangan lengkap terdiri dari”:

- (a) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- (b) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- (c) “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- (d) “Laporan arus kas selama periode;”

(e) “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;”

(ea) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan”

Paragraf 38 dalam PSAK 201 menyatakan, “entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK Indonesia. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan” (IAI, 2024). Sedangkan, paragraf 38A dalam PSAK 201 menyatakan, “entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait” (IAI, 2024).

(f) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menetapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

“Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan keberhasilan atau profitabilitas yang dihasilkan dari operasi perusahaan selama periode waktu tertentu” (Weygandt et al., 2022). “Secara umum, dalam laporan laba rugi perusahaan akan menyajikan beberapa bagian / komponen laba rugi, antara lain” (Kieso et al., 2024):

1. “*Sales or Revenue Section*”

“Menyajikan penjualan, diskon, tunjangan, pengembalian, dan informasi terkait lainnya dengan tujuannya untuk memperoleh jumlah bersih pendapatan penjualan”.

2. *“Cost of Goods Sold Section”*
“Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan”.
3. *“Gross Profit”*
“Penjualan (*revenue*) dikurangi *COGS*”.
4. *“Selling Expense”*
“Melaporkan seluruh beban yang dihasilkan oleh perusahaan dalam usaha untuk melakukan penjualan”.
5. *“Administrative or General Expenses”*
“Melaporkan seluruh biaya administrasi umum”.
6. *“Other Income and Expense”*
“Sebagian besar transaksi lain yang tidak masuk dalam kategori pendapatan dan biaya di atas. Misalnya keuntungan dan kerugian dari penjualan aset berumur panjang, *impairments*, dan biaya restrukturisasi. Selain itu, tambahan penghasilan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividend, dan pendapatan bunga sering dilaporkan”.
7. *“Income from Operations”*
“Hasil yang diperoleh perusahaan dari operasi normal”.
8. *“Financing costs”*
“Pos-pos terpisah yang mengidentifikasi biaya *financing* perusahaan, selanjutnya disebut juga beban bunga”.
9. *“Income before Income Tax”*
“Jumlah penghasilan sebelum pajak penghasilan”.
10. *“Income Tax”*
“Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dibebankan atas pendapatan sebelum pajak”.
11. *“Income from Continuing Operations”*
“Hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian apapun dari *discontinued operations*. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari *discontinued operations*, maka bagian ini dilaporkan sebagai *net income*”.

12. *“Discontinued Operations”*

“Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari disposisi suatu komponen perusahaan”.

13. *“Net Income”*

“Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.

14. *“Non-Controlling Interest”*

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non pengendali”.

15. *“Earnings per Share”*

“Jumlah per saham yang dilaporkan”.

2.3 Persistensi Laba

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain”. Menurut Effendi (2022), “laba merupakan salah satu komponen keuangan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laba juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan”. Menurut Kieso et al. (2024), “laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama periode tertentu. Investor dan kreditor menggunakan informasi dalam laporan laba rugi untuk”:

1. “Melakukan evaluasi kinerja perusahaan di masa lalu (*past performance*). Dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran, untuk mengetahui kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan para kompetitor”
2. “Menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi mengenai kinerja masa lalu membantu dalam mengidentifikasi tren penting yang jika terus berlanjut dapat memberikan informasi mengenai kinerja di masa mendatang”
3. “Membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas di masa depan. Informasi mengenai berbagai komponen laba, seperti

pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian merupakan komponen yang saling berhubungan. Informasi tersebut berperan dalam menilai risiko ketidakmampuan dalam mencapai tingkat arus kas tertentu di masa depan”.

“Perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi saat kewajiban kinerja telah dipenuhi, yaitu pada saat perusahaan telah menyediakan layanan (*service*) atau barang (*goods*) kepada pelanggan” (Weygandt et al., 2022). Menurut *International Accounting Standards Board (IASB)*, “terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan *revenue recognition*” (Kieso et al., 2024):

1. “Perusahaan memiliki hak atas pembayaran untuk aset (produk)”
2. “Perusahaan telah mengalihkan hak kepemilikan aset (produk) secara hukum”
3. “Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik aset (produk)”
4. “Pelanggan memiliki risiko dan imbalan kepemilikan yang signifikan atas aset (produk)”
5. “Pelanggan telah menerima aset (produk)”.

“Pendapatan (*revenues*) berasal dari berbagai *ordinary activities* perusahaan, seperti penjualan, biaya (*fees*), bunga, dividen, dan sewa” (Kieso et al., 2024). “Ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dihasilkan laba bersih (*net income*), namun jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka dihasilkan kerugian bersih (*net loss*)” (Weygandt et al., 2022). “Informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki peranan penting dalam menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh” (Oktavia & Susanto, 2022). “Ketika menganalisis informasi mengenai laba, *stakeholders* tidak hanya memperhatikan laba pada periode berjalan, melainkan juga harus memperhatikan laba pada periode selanjutnya. Salah satu indikator untuk memprediksi laba di masa mendatang dengan menggunakan laba tahun berjalan sebagai acuan adalah persistensi laba” (Rohit & Suhendah, 2021).

“Semakin tinggi persistensi laba maka semakin tinggi kualitas laba, karena persistensi laba menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini hingga masa mendatang” (Hanifa & Malik, 2022). “Persistensi laba mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan laba secara konsisten di masa depan” (Syarifudin & Najmudin, 2024) dalam (Maulana, 2024). “Perusahaan dengan laba yang konsisten cenderung menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan laba dan mampu menyajikan informasi yang lebih bermakna untuk evaluasi kinerja, kepentingan pemantauan, dan pengambilan keputusan” (Ardianti, 2018) dalam (Santoso & Handoko, 2023). “Persistensi laba (*earnings persistence*) menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan” (Jeremiah & Akpanuko, 2024). Misalnya, “dengan memperkuat bisnis inti dan memperluas portofolio bisnis, untuk menyeimbangkan kinerja yang solid dengan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan bertransformasi, didukung dengan ekosistem bisnis yang saling terhubung secara sinergis untuk terus mengoptimalkan sumber daya dan rantai pasokan” (ASII, 2024). “Melalui penerapan strategi manajemen yang tepat, perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan keuntungan” (Universitas Medan Area, 2026).

“Ketika laba perusahaan meningkat, maka laba tersebut dianggap berkualitas dan menarik minat investor untuk menanamkan modal mereka” (Hasanuddin et al., 2021). “Perusahaan yang memiliki persistensi laba yang tinggi mengindikasikan adanya hubungan yang semakin kuat antara laba dengan imbal hasil (*return*) investor dalam bentuk *return* saham” (Nurdiniah & Oktapriana, 2023). Sehingga, “persistensi laba menjadi hal yang penting karena semakin persisten suatu laba perusahaan maka investor akan semakin mampu untuk memprediksi laba di masa yang akan datang” (Pratomo & Nuraulia, 2021).

Di sisi lain, “laba dengan persistensi rendah dapat menunjukkan kualitas laba yang rendah” (Permataningtyas et al., 2026). “Laba yang berkualitas

rendah atau buruk dapat digambarkan dengan laba yang tidak berkelanjutan” (Nurdiniah & Oktapriana, 2023). “Kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap perusahaan” (Pamungkas, 2019) dalam (Miswaty & Novitasari, 2023). Misalnya, “mempertahankan segmen usaha yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar dan tidak prospektif, menyebabkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan kompetitor dan tidak mampu menghasilkan laba bahkan mengalami kerugian yang terus meningkat” (Rahayu, 2025). “Laba perusahaan yang semakin rendah akan menyebabkan persistensi laba menjadi rendah” (Prasetyo et al., 2021). “Investor tidak mengharapkan kualitas informasi laba yang rendah (*low quality*) karena merupakan sinyal alokasi sumber daya yang kurang baik” (Hanifa & Malik, 2022). “Investor akan ragu untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kualitas laba yang rendah, karena akan menerima pengembalian (*return*) dalam jumlah kecil dan tidak sesuai dengan harapannya” (Magdalena & Trisnawati, 2022) dalam (Mumtaz & Suwarno, 2024).

“Persistensi laba dapat diketahui dengan mengukur koefisien regresi laba sebelum pajak tahun berjalan ($PTBI_t$) terhadap laba sebelum pajak tahun depan ($PTBI_{t+1}$). Regresi ini menggunakan ($PTBI_{t+1}$) sebagai variabel dependen dan ($PTBI_t$) sebagai variabel independen. Rumus persistensi laba dinyatakan sebagai berikut” (Suwandika & Astika, 2013) dalam (Setyaningrum, 2021):

$$PTBI_{t+1} = \alpha + \beta PTBI_t + \varepsilon \quad (2.1)$$

Keterangan:

$PTBI_{t+1}$: laba sebelum pajak 1 tahun setelah tahun penelitian

$PTBI_t$: laba sebelum pajak pada tahun penelitian

α : konstanta

β : koefisien regresi

ε : tingkat *error*

“Perusahaan memiliki *high persistent profits* jika nilai $\beta_1 > 1$, jika nilai $\beta_1 > 0$ maka perusahaan memiliki laba yang persisten. Sementara itu, perusahaan yang tidak memiliki persistensi laba, memiliki nilai $\beta_1 \leq 0$ ” (Renaldo et al., 2024). Menurut (Camille & Effriyanti, 2020) dalam (Albi & Stiawan, 2025), “ $PTBI_{t+1}$ dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut”:

$$PTBI_{t+1} = \frac{\text{Laba sebelum pajak tahun depan}}{\text{Rata - rata total aset}} \quad (2.2)$$

Menurut (Arisandi & Astika, 2019) dalam (Fillio & Diana, 2024), “ $PTBI_t$ dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut”:

$$PTBI_t = \frac{\text{Laba sebelum pajak tahun berjalan}}{\text{Rata - rata total aset}} \quad (2.3)$$

Menurut Atrill & McLaney (2024), “laba sebelum pajak (*profit before taxation*) merupakan laba yang diperoleh dengan mengurangi beban bunga (*interest charges*) dari laba operasional. Pada usaha perseorangan (*sole proprietor*) atau kemitraan, laporan laba rugi akan selesai pada bagian laba sebelum pajak”. Menurut Weygandt et al. (2022), “rata-rata total aset dapat dihitung dengan rumus”:

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Total aset awal tahun}_t + \text{Total aset akhir tahun}_t}{2} \quad (2.4)$$

“Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuan untuk menyediakan jasa atau manfaat di masa depan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan arus kas masuk (*receipts*)” (Weygandt et al., 2022). Informasi terkait aset yang dimiliki perusahaan terdapat dalam laporan posisi keuangan (*statement of financial position*). “Laporan posisi keuangan umumnya memuat *standard classifications*” (Weygandt et al., 2022):

1. “*Intangible assets*”

“*Intangible assets* atau aset takberwujud adalah hak, *privileges*, dan keunggulan kompetitif yang timbul dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik. Bukti kepemilikan atau keberadaan aset tidak berwujud adalah kontrak atau lisensi”. Menurut Kieso et al. (2024), “aset takberwujud meliputi, paten (*patents*), hak cipta (*copyrights*), waralaba (*franchise*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*), dan daftar pelanggan”.

2. “*Property, plant, and equipment*”

“*Property, plant, and equipment* disebut juga *fixed assets*, yaitu aset yang diharapkan perusahaan dapat digunakan dalam beberapa tahun atau lebih dari satu tahun. *Fixed assets* atau aset tetap memiliki tiga karakteristik, yaitu”:

- a. “Aset memiliki wujud fisik (*physical substance*)”
- b. “Aset digunakan dalam operasional bisnis”
- c. “Aset tidak diperuntukan untuk dijual ke pelanggan”

“Aset tetap terdiri dari properti fisik seperti tanah (*land*), bangunan, mesin, *furniture*, peralatan, dan sumber daya habis pakai (*minerals*). Perusahaan melakukan penyusutan (*depreciates*) atau pengurangan (*depletes*) aset tetap, kecuali pada aset berupa tanah” (Kieso et al., 2024).

3. “*Long-term investments*”

“*Long-term investments* atau investasi jangka panjang disebut juga sebagai *investments*, umumnya terdiri dari salah satu jenis berikut” (Kieso et al., 2024):

- a. “*Investment in securities* atau surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang”
- b. “*Investment in tangible assets* yang tidak digunakan dalam operasional, seperti tanah yang dimiliki untuk tujuan *speculation*”
- c. “*Investment set aside in special funds* atau dana khusus, seperti dana pelunasan utang atau dana pelunasan pabrik”

- d. “Investasi dalam anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan atau perusahaan asosiasi”

Menurut Kieso et al (2024), “perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang (*investment in debt*) dan surat berharga ekuitas (*equity securities*) ke dalam tiga portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan”:

- a. “*Held for collection*, yaitu surat utang yang dikelola perusahaan untuk menagih pembayaran pokok dan bunga sesuai kontrak perjanjian”
- b. “*Trading*, yaitu surat utang dan ekuitas yang dibeli dan disimpan untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari perubahan harga jangka pendek”
- c. “*Non-trading equity*, yaitu surat ekuitas tertentu yang disimpan dan tidak untuk diperdagangkan (misalnya, untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak)”.

4. “*Current assets*”

“*Current assets* atau aset lancar mencakup kas, investasi yang dimiliki untuk tujuan perdagangan (*investment for trading*), dan aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama”. “Terdapat lima pos utama (*major items*) yang terdapat dalam bagian aset lancar, yaitu” (Kieso et al., 2024):

a. “*Inventories*”

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 202 tentang persediaan, “persediaan meliputi barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali termasuk, sebagai contoh, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer dan dikuasai untuk dijual kembali, atau tanah dan properti lainnya yang dikuasai untuk dijual kembali”. Menurut Weygandt et al. (2022), “pada perusahaan dagang, persediaan terdiri dari banyak jenis barang yang berbeda-beda, namun hanya memiliki satu kategori, yaitu *merchandise inventory*. Sedangkan pada perusahaan

manufaktur, persediaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu”:

- 1) “*Raw materials*, persediaan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi”
 - 2) “*Work in process (WIP)*, persediaan barang dalam proses yaitu persediaan yang telah masuk dalam kegiatan produksi tetapi belum selesai”
 - 3) “*Finished goods (FG)*, persediaan barang jadi yaitu persediaan yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual”.
- b. “*Prepaid Expenses*”

“*Prepaid expense* atau beban dibayar di muka merupakan bagian dari aset lancar, ketika perusahaan menerima manfaat (umumnya dalam bentuk jasa) dalam jangka waktu yang lebih lama antara satu tahun atau satu siklus operasi. *Prepaid expense* dicatat sebesar nilai biaya yang belum jatuh tempo atau belum digunakan. Contoh beban dibayar di muka, seperti sewa dibayar di muka, iklan pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional”.

- c. “*Receivables*”

“*Accounts receivable* adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Pelanggan seringkali berutang pada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan, utang pelanggan tersebut diklasifikasikan sebagai piutang dagang (*trade receivable*) yang termasuk dalam aset lancar. *Trade receivable* adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang telah dibeli, sedangkan surat utang piutang (*notes receivable*) adalah janji tertulis pelanggan untuk membayar sejumlah utang pada tanggal tertentu di masa depan”. Menurut Weygandt et al. (2022), “pengakuan piutang usaha relatif sederhana, yaitu”:

- 1) “Sebuah organisasi jasa mencatat piutang usaha ketika memberikan layanan atas dasar kredit”

2) “Seorang pedagang mencatat piutang usaha pada saat penjualan barang atas dasar kredit. Ketika perusahaan menjual barang, maka perusahaan akan meningkatkan (*debited*) piutang usaha dan meningkatkan (*credited*) pendapatan penjualan”.

d. “*Short-term investment*”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*short-term investment* atau investasi jangka pendek disebut juga dengan *marketable securities*, yaitu surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan dengan ciri-ciri, yaitu”:

1) “*Readily marketable*”

“Suatu investasi dikatakan mudah diperdagangkan jika dapat dijual dengan mudah pada saat dibutuhkan dana tunai. Surat berharga jangka pendek memenuhi kriteria ini, karena dapat dengan mudah dijual kepada investor lain. Selain itu, saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek juga mudah diperdagangkan”.

2) “*Intended to be converted into cash*”

“*Intent to convert* artinya manajemen berencana menjual investasi tersebut dalam jangka waktu satu tahun ke depan atau sepanjang siklus operasional, mana yang lebih lama”.

e. “*Cash and Cash Equivalents*”

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas, “kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*). Sedangkan, setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan”.

2.4 Arus Kas Operasi

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207, “ arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas”. “ Arus kas operasi merupakan kegiatan operasional yang terjadi dalam suatu perusahaan yang diperoleh dari sumber utama perusahaan” (Riskiya & Africa, 2022). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207, “ laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. “ Informasi dalam laporan arus kas harus membantu investor, kreditor, dan pihak lain untuk menilai hal-hal berikut” (Weygandt et al., 2022):

1. “Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Dengan menganalisa hubungan antar pos dalam laporan arus kas, investor dapat membuat prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa mendatang lebih baik daripada yang mereka peroleh dari data berbasis akrual”
2. “Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Karyawan, kreditor, dan *shareholders* tertarik dengan laporan ini karena laporan ini menunjukkan arus kas dalam bisnis”
3. “Alasan perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi. Namun, beberapa pengguna laporan keuangan sangat kritis terhadap laba bersih berbasis akrual karena membutuhkan banyak estimasi. Akibatnya, pengguna sering mempertanyakan keandalan nominal tersebut. Tidak demikian halnya dengan kas. Banyak pembaca laporan arus kas ingin mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kemudian mereka dapat menilai sendiri keandalan angka laba rugi tersebut”
4. “Transaksi investasi dan pendanaan kas selama periode tersebut. Dengan memeriksa transaksi investasi dan pendanaan perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami perubahan nilai aset dan utang selama periode tersebut”.

Menurut Kieso et al. (2024), “perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode ke dalam tiga aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas, antara lain:”

1. “*Operating Activities*”

“Aktivitas operasi (*operating activities*) mencakup dampak kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban” (Weygandt et al., 2022). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207, “aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan”.

2. “*Investing Activities*”

“Aktivitas investasi (*investing activities*) merupakan aktivitas yang mencakup membuat dan mengumpulkan pinjaman, memperoleh dan melepaskan investasi, serta aset tetap atau aset produktif jangka panjang”.

3. “*Financing Activities*”

“Aktivitas pembiayaan (*financing activities*) merupakan aktivitas yang melibatkan utang dan ekuitas, seperti meminjam uang dari kreditor, mendapatkan sumber daya dari pemilik, dan memberikan pengembalian atas investasi pemilik”.

“Perusahaan yang *mature* dan sukses sering kali menghasilkan arus kas dalam jumlah yang besar, bahkan melebihi kebutuhan jangka pendeknya” (Weygandt et al., 2022). “Jumlah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana kegiatan operasional perusahaan telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, mempertahankan kemampuan operasional, membagikan dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pembiayaan eksternal” (Kieso et al., 2024).

“Para kreditor memeriksa laporan arus kas secara cermat, karena khawatir dengan kepastian memperoleh pembayaran. Pemeriksaan dimulai dengan melihat arus kas bersih dari kegiatan operasional. Jumlah yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan operasional untuk membayar tagihannya tanpa perlu melakukan pinjaman kembali” (Kieso et al., 2024). “*Operating cash flow* yang tinggi menunjukkan kinerja operasional yang baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional sekaligus memiliki surplus kas. Selain itu, arus kas operasi yang tinggi dan kuat menunjukkan bahwa suatu bisnis memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (pembayaran utang, bunga, dan biaya operasional lainnya), kewajiban jangka panjang, mengurangi risiko kebangkrutan, serta meningkatkan stabilitas keuangan” (Annisa & Amalia, 2024). “Informasi arus kas perusahaan dipakai investor sebagai indikator untuk mengetahui kemungkinan perusahaan membayar dividen. Sedangkan, kreditor dapat melihat ketersediaan kas perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya” (Wijaya & Suhendah, 2023).

“Arus kas operasi yang positif menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, karena indikator ini mencerminkan likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta membiayai pertumbuhan perusahaan” (Siagian & Munthe, 2026). “Perusahaan yang menghasilkan arus kas positif mampu mendanai pertumbuhan perusahaan melalui ekspansi bisnis atau aktivitas investasi” (Hery, 2016) dalam (Wijaya & Suhendah, 2023). “Arus kas operasi yang positif dan stabil biasanya dianggap sebagai indikator kesehatan keuangan dan potensi keuntungan yang berkelanjutan, sehingga investor cenderung memberikan penilaian lebih tinggi terhadap saham perusahaan dengan arus kas operasional yang kuat. Sebaliknya, arus kas operasional yang negatif atau fluktuatif dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan laba” (Yulianti et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024), “jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasional yang rendah atau negatif, menunjukkan bahwa perusahaan harus meminjam atau menerbitkan *equity securities* untuk memperoleh kas yang

cukup untuk membayar tagihannya”. “Arus kas operasi yang negatif terjadi akibat kegagalan aktivitas operasi, sehingga perusahaan harus mencari alternatif sumber kas” (Wijaya & Suhendah, 2023). Selain itu, “jika perusahaan tidak memiliki kas yang cukup, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, melunasi utang, membagikan dividen, ataupun membeli peralatan” (Kieso et al., 2024). Sehingga, “kecilnya arus kas menyebabkan investor dan kreditor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, kemudian dapat menarik seluruh dananya. Selain itu, ketika sebuah perusahaan mengalami arus kas negatif yang berlangsung lama, menunjukkan adanya masalah dengan kondisi keuangan perusahaan” (Dewi et al., 2022).

Menurut Gunawan & Gurusinga (2022), dalam mengukur arus kas operasi digunakan rumus:

$$\text{Arus Kas Operasi} = \text{Arus kas operasi tahun berjalan}$$

(2.5)

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207, “jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah”:

- a. “Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;”
- b. “Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;”
- c. “Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;”
- d. “Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;”

- e. “Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi; dan”
- f. “Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan”.

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 207, “entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut”:

- a. “Metode langsung”

“Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan”. Menurut Weygandt et al. (2022), “metode langsung (*direct method*) adalah metode yang menunjukkan jumlah penerimaan (*receipts*) dan pengeluaran (*payments*) kas dari aktivitas operasi perusahaan”.
- b. “Metode tidak langsung”

“Dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan”. Menurut Weygandt et al. (2022), “metode tidak langsung (*indirect method*) adalah metode yang mengkonversi laba bersih (*net income*) menjadi jumlah kas bersih”.

2.5 Pengaruh Arus Kas Operasi Perusahaan terhadap Persistensi Laba

“*Operating cash flows* adalah indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dan pembiayaannya” (Almomani et al., 2023). “Adanya jumlah arus kas yang cukup, maka perusahaan tidak perlu mengandalkan pembiayaan dari luar (penerbitan saham atau pinjaman dari pihak eksternal). Artinya, dana yang diinvestasikan oleh investor dikelola oleh perusahaan secara efektif dan efisien sehingga informasi arus kas operasi

perusahaan dapat digunakan untuk memverifikasi laba dan mengukur kinerja perusahaan” (Abdillah et al., 2021).

“Perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang tinggi dianggap bisa mengatur proses operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan lebih optimal dalam menghasilkan keuntungan serta menjaga persistensi laba” (Salam & Amin, 2024). “Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh arus kas operasional, karena kinerja yang baik dari arus kas operasional akan mencerminkan laba yang baik. Laba yang dihasilkan akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional tanpa tergantung pada dana dari pihak eksternal” (Oktavia & Susanto, 2022). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesimpulan terkait pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian Abdillah et al. (2021), Gunawan & Gurusinga (2022), Almomani et al. (2023) dan Fillio & Diana (2024) menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2021), Oktavia & Susanto (2022), dan Salam & Amin (2024) menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Berdasarkan penjelasan mengenai arus kas operasi yang diproksikan dengan total arus kas operasi dan pengaruhnya terhadap persistensi laba, maka dapat disusun hipotesis pertama dalam penelitian sebagai berikut:

Ha1: Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

2.6 Ukuran Perusahaan

“Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya nilai perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan” (Riskiya & Africa, 2022). “Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi tiga kategori, *large firm size* (perusahaan besar), *medium firm size* (perusahaan menengah), dan *small firm size* (perusahaan kecil)” (Hasanuddin et al., 2021). “Ukuran perusahaan merupakan total aset, karena aset yang besar mencerminkan kematangan

bisnis, stabilitas, dan prospek jangka panjang” (Goh, 2023) dalam (Januandika et al., 2025).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2017) Nomor 53/POJK.04/2017, emiten dikategorikan menjadi tiga:

1. “Emiten Skala Kecil”

“Emiten Skala Kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dengan total aset yang dimiliki tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

2. “Emiten Skala Menengah”

“Emiten Skala Menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dengan total aset lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

3. “Emiten Skala Besar”

“Emiten Skala Besar adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

“Perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil berdasarkan keseluruhan aset yang dimiliki. Karena, aset sebagai indikator kekayaan dan sumber daya utama entitas, pengelolaan aset yang efektif dan efisien diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang” (Desyana et al., 2023). “Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan” (Roslita & Safitri, 2022). “Perusahaan berskala besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya melimpah untuk mencapai tujuan perusahaan” (Damayanty & Putri, 2021). Menurut Ananta et al. (2025), “ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya dalam mengelola operasi bisnis”. “Kepemilikan aset yang tinggi mencerminkan kondisi keuangan yang stabil dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan entitas yang memiliki aset lebih sedikit”

(Desyana et al., 2023). Selain itu, “perusahaan besar umumnya menjalankan berbagai usaha, sehingga risiko kegagalan lebih kecil serta cenderung memperoleh keuntungan yang konsisten” (Januandika et al., 2025). “Investor cenderung memilih perusahaan dengan ukuran besar, karena dinilai mampu memberikan kualitas yang baik dengan tingkat laba yang stabil” (Riskiya & Africa, 2022). Sehingga, “semakin besar ukuran perusahaan, semakin mudah perusahaan dalam memperoleh sumber dana, baik sumber dana internal maupun eksternal” (Sari & Dewi, 2019) dalam (Partiwi & Herawati, 2022).

Sebaliknya, “perusahaan kecil menghadapi keterbatasan sumber daya pendukung produksi dan akses terhadap pendanaan eksternal yang menghambat pertumbuhan perusahaan” (Muzayin & Trisnawati, 2022) dalam (Muljono & Rohman, 2025). “Semakin kecil ukuran perusahaan maka akan semakin sulit dalam menjalankan usahanya karena investor dan konsumen lebih memilih dan percaya pada perusahaan yang besar dengan total asetnya yang besar dibanding perusahaan yang kecil” (Fitriyani, 2021). “Perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah cenderung menghasilkan laba yang lebih kecil dan lebih berfluktuasi dibandingkan dengan perusahaan besar” (Saragih, 2021). “Perusahaan kecil belum memiliki *track record* kinerja, pengalaman, dan status yang dapat membuktikan kompetensi dan kejujuran perusahaan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman (*lenders*) dapat menilai peminjam (perusahaan) sebagai calon yang kurang layak (*unwanted borrowers*) dengan menetapkan suku bunga yang tinggi (*interest rates*), meminta jaminan yang lebih banyak, atau memberlakukan persyaratan administrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan standar pasar yang berlaku” (Santos & Castanho, 2022). Selain itu, menurut Maulita & Framita (2021), “perusahaan kecil memiliki keterbatasan aset dan pengalaman yang terbatas dalam mengelola perusahaan, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh laba yang stabil di setiap periodenya”.

Di sisi lain, menurut Anggraini & Rivandi (2023), “semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan

aktivitas operasional, seperti biaya pemeliharaan mesin, kendaraan, dan peralatan, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan”. Menurut Noor & Srimindarti (2022), “semakin besar ukuran suatu perusahaan tidak selalu mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin banyak aset yang dimiliki maka semakin besar beban yang dimiliki suatu perusahaan, karena pengelolaan aset yang besar juga membutuhkan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan kecil dapat memiliki kinerja keuangan yang lebih baik jika mampu mengelola asetnya untuk memperoleh laba”.

Berdasarkan penelitian Abdillah et al. (2021), “ukuran perusahaan diukur dengan rumus”:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

(2.6)

Keterangan:

Ln : logaritma natural

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan, memiliki nilai, serta diharapkan akan memberikan manfaat di masa mendatang” (Miller-Nobles et al., 2021). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika”:

- a. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasional normal;”
- b. “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”
- c. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d. “Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria aset lancar sebagai aset tidak lancar. Istilah aset tidak lancar mencakup aset tetap, aset takberwujud dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang”. Menurut IAI (2024) dalam PSAK 216 tentang Aset Tetap, “aset tetap adalah aset berwujud yang”:

- a. “Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan”
- b. “Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”

Menurut Kieso et al. (2024), “aset tetap memiliki karakteristik untuk digunakan dalam operasional dan tidak untuk dijual, memiliki umur manfaat yang panjang, biasanya disusutkan, serta memiliki bentuk fisik (berwujud)”. Menurut IAI (2024) dalam PSAK 216 tentang aset tetap, “depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya”. “Terdapat tiga metode depresiasi untuk menghitung biaya depresiasi aset tetap, yaitu” (Kieso et al., 2024):

1. “*Activity Method (Units of Use or Production)*”

“Metode depresiasi ini memiliki asumsi bahwa depresiasi dari sebuah fungsi penggunaan atau aktivitas, dibandingkan dengan berjalannya waktu. Perusahaan yang menggunakan metode ini lebih menekankan pada umur aset yang berdasarkan jumlah *output* yang dapat dihasilkan atau jumlah *input* dari jam kerja suatu aset”.

2. “*Straight-line Method*”

“Metode depresiasi ini menekankan bahwa depresiasi pada sebuah fungsi dari berjalannya waktu daripada fungsi penggunaan suatu aset. Banyak perusahaan menggunakan metode ini karena kesederhanaannya”. “Terdapat tiga faktor dalam perhitungan depresiasi, yaitu” (Weygandt et al., 2022):

- a. “*Cost*, yaitu biaya perolehan aset serta seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan”. Menurut IAI (2024)

dalam PSAK 216, “biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehannya, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap”

- b. “*Useful life* atau umur manfaat, yaitu estimasi dari masa produktif atau *service life* dari suatu aset yang dimiliki”
- c. “*Residual value* atau nilai residu, yaitu nilai sisa berdasarkan hasil perkiraan nilai aset pada akhir umur manfaatnya”.

3. “*Diminishing (Accelerated)-Charge Methods*”

“Metode depresiasi berikut menghasilkan nilai depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal penggunaan aset dan lebih rendah pada tahun-tahun akhir. Terdapat dua metode dalam *diminishing (accelerated) charge method*, yaitu”:

a. “*Sum-of-The-Years’-Digits*”

“Metode depresiasi yang menghitung penurunan beban depresiasi melalui penurunan pecahan dalam *depreciable cost*. Setiap pecahannya menggunakan nilai penjumlahan dari tahun-tahun penggunaannya sebagai *denominator*, sedangkan *numerator* adalah angka dari perkiraan umur yang tersisa pada awal tahun perhitungan depresiasi”.

b. “*Declining-Balance Methods*”

“Metode depresiasi yang menggunakan tarif depresiasi (biasanya dihitung dalam presentase) yang digunakan dalam metode garis lurus (*straight line rate*) dan dikali dua. Metode *double declining* tidak mengurangi nilai residu dalam memperhitungkan dasar nilai depresiasi, tidak seperti metode lainnya”.

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 238 tentang Aset Takberwujud, “aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik”.

“Perusahaan akan melakukan penyusutan (*amortizes*) atas aset takberwujud dengan *limited-life* selama periode yang lebih pendek antara *legal life* atau *useful life*” (Kieso et al., 2024).

2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Persistensi Laba

“Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut cenderung lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil” (Fitriyani, 2021). “Perusahaan yang stabil umumnya memiliki tingkat kepastian yang tinggi dalam memperoleh laba serta memiliki sumber daya yang besar untuk digunakan dalam kegiatan usaha” (Abdillah et al., 2021). “Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan peningkatan ukurannya, tingkat laba juga meningkat, sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih konsisten” (Latifah & Hernawati, 2024). Menurut Astuti & Damayanty (2024) perusahaan dengan skala besar menyebabkan, “stabilitas perusahaan akan lebih mudah diperhitungkan, sehingga kesalahan estimasi menjadi kecil. Selain itu, perusahaan besar dinilai memiliki peluang yang baik dalam jangka waktu relatif panjang serta lebih berpotensi menghasilkan laba yang konsisten”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesimpulan terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2021), Setiana & Hadianto (2023), dan Astuti & Damayanty (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin et al. (2021), Latifah & Hernawati (2024), dan Fillio & Diana (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Berdasarkan penjelasan mengenai ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma total aset dan pengaruhnya terhadap persistensi laba, maka dapat disusun hipotesis kedua dalam penelitian sebagai berikut:

Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

2.8 Environmental Social Governance (ESG) Disclosure

“Konsep *ESG* masing-masing mewakili isu-isu lingkungan, tanggung jawab sosial, dan faktor tata kelola perusahaan” (Khamisu & Paluri, 2024). “Pengungkapan *ESG* menggambarkan proses organisasi dalam menyampaikan informasi terkait dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat luas” (Kim & Peng, 2024) dalam (Yudhira & Hasanah, 2025). “*ESG* terdiri dari tiga dimensi, yaitu” (Su, 2025):

1. “*Environmental Dimension (E)*”

“*Environmental dimension* atau dimensi lingkungan berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungan ekologi (*ecological environment*) serta kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya”. “Dimensi lingkungan mencakup cara perusahaan dalam mengelola limbah, memanfaatkan energi terbarukan, menimbulkan polusi ke atmosfer akibat operasional, serta menanggapi masalah perubahan iklim. Dalam konteks dimensi lingkungan, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengemukakan kekhawatiran mengenai cara menangani perubahan iklim, mengelola sumber daya air, dan mengelola sampah” (Armstrong, 2020) dalam (Khamisu & Paluri, 2024).

2. “*Social Dimension (S)*”

“*Social dimension* atau dimensi sosial berfokus pada hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemenuhan tanggung jawab sosialnya, mencakup keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan. Ketidalcukupan (*deficiencies*) dalam dimensi sosial dapat menimbulkan ketegangan hubungan dengan pemangku kepentingan, konflik sosial, serta tekanan publik, yang dapat mempengaruhi reputasi sosial dan daya saing perusahaan di pasar.

Faktor-faktor ini pada akhirnya mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk melakukan *sustainable development* dan secara tidak langsung mempengaruhi investasi dan kinerja lingkungan”. “Dimensi sosial membahas isu-isu dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan hubungan sosial, kebijakan (*policy*), keragaman (*diversity*), dan politik” (Armstrong, 2020) dalam (Khamisu & Paluri, 2024).

3. “*Governance Dimension (G)*”

“*Governance dimension* atau dimensi tata kelola mengukur mekanisme pengambilan keputusan dan kemampuan manajemen risiko perusahaan, termasuk struktur tata kelola perusahaan dan perilaku perusahaan. Ketidacukupan atau kekurangan dalam dimensi tata kelola dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, kekacauan manajemen internal, dan pengendalian risiko yang tidak memadai (*inadequate*), yang berdampak negatif terhadap efisiensi operasional serta pengembangan jangka panjang. Ketidacukupan dalam dimensi ini juga secara tidak langsung berdampak pada investasi dan hasil pengelolaan lingkungan”. “Aspek tata kelola membahas kekhawatiran pemangku kepentingan, seperti upaya yang dihargai (*rewarded*) dalam organisasi atau apakah organisasi menyediakan laporan mengenai tata kelolanya atau mendorong standar etika” (Armstrong, 2020) dalam (Khamisu & Paluri, 2024).

Pengungkapan *ESG* dilakukan oleh perusahaan melalui proses pelaporan keberlanjutan. “Perusahaan yang telah melakukan upaya dalam menyampaikan informasi keberlanjutan akan menunjukkan keterlibatan dan komitmen mereka dalam proses pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*)” (Dissanayake *et al.*, 2019) dalam (Wijaya & Wedari, 2023). “Pelaporan keberlanjutan adalah praktik menyediakan informasi terkait isu-isu keberlanjutan oleh perusahaan. Pelaporan keberlanjutan juga membahas terkait ketergantungan perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi, risiko dan peluang yang berkaitan dengan ketergantungan tersebut, serta tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan terkait *sustainability*” (Laine & Tregidga, 2025). “Manfaat dari

proses pelaporan keberlanjutan adalah memastikan bahwa bisnis mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap isu-isu keberlanjutan dan memberikan perusahaan kesempatan untuk terbuka tentang peluang dan risiko yang dihadapi” (Adrina & Pohan, 2024). Pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan disampaikan dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability reports*).

“Laporan keberlanjutan adalah laporan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk memaparkan suatu kegiatan mengenai dampak dari aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan dapat diterbitkan sebagai satu kesatuan dengan laporan tahunan sebuah perusahaan, namun dapat juga berdiri sendiri (*standalone*)” (Apriliyani et al., 2021). Menurut *World Commission for Environment and Development* (1987), “pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri” (Nassos & Avlonas, 2025). “*Sustainable development* merupakan proses untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*), yaitu hidup sesuai dengan *limits* atau keterbatasan yang dimiliki bumi. Keberlanjutan merupakan suatu kondisi yang harus dicapai agar kehidupan yang saat ini, yang didukung oleh bumi dapat berkelanjutan di masa depan” (Laine & Tregidga, 2025). Sehingga laporan keberlanjutan tidak hanya menunjukkan upaya perusahaan dalam menyampaikan isu-isu keberlanjutan (*sustainability matters*), tetapi merupakan komitmen perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*).

“Bergantung pada pedoman yang berwenang, pengungkapan *ESG* dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*) atau wajib” (Khamisu & Paluri, 2024). Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2017) dalam peraturan nomor 51/POJK.03/2017, “Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan keberlanjutan”. “Meningkatnya minat terhadap *ESG*

mendorong investor untuk mencari cara yang lebih mudah dalam menilai isu-isu *ESG* melalui metrik yang dapat dibandingkan dan konsisten. Penyedia peringkat *ESG* juga menuntut adanya pengungkapan *ESG* yang lebih *comparable* dan *consistent* dari perusahaan. Tekanan ini meningkatkan permintaan untuk menyelaraskan berbagai kerangka kerja, standar, dan regulasi dalam pelaporan informasi *ESG*” (Adams & Abhayawansa, 2022) dalam (Khamisu & Paluri, 2024). “Terdapat beberapa standar dan kerangka kerja (*frameworks*) pelaporan keberlanjutan yang mewakili pedoman global paling dikenal (*well-known global guidelines*), yaitu” (Laine & Tregidga, 2025):

1. “*The Global Reporting Initiative (GRI)*”

“*GRI* merupakan organisasi yang berfokus pada pelaporan terkait dampak dari kegiatan organisasi dengan mengadopsi perspektif dari dalam ke luar (*inside-out*) dalam pelaporan keberlanjutan. *GRI* didirikan pada tahun 1997, dengan kerangka kerja pelaporan pertama diterbitkan pada tahun 2000. Seiring berjalannya waktu, kerangka kerja pelaporan *GRI* terus berkembang dan berevolusi. Berdasarkan survei Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) tahun 2024, sebagian besar perusahaan terbesar di dunia menggunakan *GRI standard* dalam pelaporan keberlanjutan mereka. Hal yang perlu diperhatikan, bahwa pengaruh *GRI* bersifat internasional, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 70% dari 100 perusahaan terkemuka yang disurvei dan sekitar tiga perempat dari 250 perusahaan terkemuka di dunia menggunakan *GRI standard*”.

Menurut Nassos & Avlonas (2025), “kerangka pelaporan *GRI* dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kerangka kerja yang diterima secara umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi. Kerangka ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, sektor, atau lokasi”. Menurut Laine & Tregidga (2025), “gagasan dasar pendekatan *GRI* adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dengan menstandarkan cara pelaporan berbagai organisasi, sehingga informasi menjadi lebih

konsisten dan dapat dibandingkan, baik dari waktu ke waktu maupun antarorganisasi”.

2. “*International Sustainability Standards Board (ISSB)*”

“*ISSB* berupaya mengembangkan standar yang dapat menjadi *baseline* global yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk pelaporan keberlanjutan dengan berfokus pada kebutuhan investor dan *financial markets*. *ISSB* dibuat berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya dengan berbagai inisiatif, seperti *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)*, *Climate Disclosure Standards Board (CDSB)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *International Integrated Reporting Council (IIRC)*”.

3. “*The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*”

“Petunjuk pelaporan, yang disahkan oleh European Union (EU) pada tahun 2014 dan diadopsi ke dalam undang-undang nasional, dapat dilihat dari perspektif retrospektif sebagai upaya yang relatif sederhana untuk mengatur praktik tersebut, sementara peraturan yang lebih baru yang diperkenalkan sebagai bagian dari *EU Green Deal* jauh lebih ambisius dan berpotensi memiliki dampak yang lebih luas. Unsur inti dari peraturan ini adalah *CSRD*, dengan peraturan terkait *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)* dan taksonomi EU berfungsi sebagai unsur-unsur kunci lainnya dalam regulasi di EU”.

Di sisi lain, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar pengungkapan keberlanjutan (SPK). Menurut IAI (2025) dalam SPK, “SPK disusun dengan mengacu pada *international financial reporting standards (IFRS) sustainability disclosure standards* yang diterbitkan oleh *ISSB*. SPK ini terdiri atas dua standar perdana, yaitu pernyataan standar pengungkapan keberlanjutan (PSPK) 1 tentang persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan PSPK 2 tentang pengungkapan terkait iklim. SPK efektif per 1 Januari 2027”. Menurut Khamisu et al. (2024), “perusahaan menggunakan *ESG disclosure* untuk menunjukkan akuntabilitas

(*accountability*) dan transparansi (*transparency*)”. Definisi transparansi menurut *GRI*, yaitu “pengungkapan informasi secara lengkap mengenai topik dan indikator yang diperlukan untuk mencerminkan dampak serta memungkinkan para pemangku kepentingan membuat keputusan, termasuk proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan dalam menyusun pengungkapan tersebut” (Nassos & Avlonas, 2025). “Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab suatu organisasi untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas organisasi, secara sederhana merupakan tindakan memberikan pertanggungjawaban” (Laine & Tregidga, 2025).

“Semakin tinggi pengungkapan *ESG* suatu perusahaan menunjukkan komitmen perusahaan yang lebih tinggi terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab sosial” (Sumar & Ratmono, 2024). “Artinya, keberlanjutan menjadi bagian dari bisnis, dengan pertumbuhan perusahaan yang sejalan dengan kinerja pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Target keberlanjutan ini kemudian menjadi bagian dari target kinerja masing-masing unit bisnis, sehingga dapat bergerak lebih tanggap dan efisien dalam menopang keberlanjutan bisnis perseroan secara jangka panjang” (UNVR, 2023). Selain itu, “kinerja *ESG* yang lebih kuat menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam melakukan *sustainable development*. Kinerja *ESG* yang luar biasa (*remarkable*) tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*)” (Wang et al., 2024). “Perusahaan yang melakukan pengungkapan *ESG* cenderung akan dihargai lebih tinggi oleh pasar, karena investor dan pemangku kepentingan menganggap perusahaan yang terbuka dalam mengungkapkan *ESG* akan lebih mampu menghadapi tantangan jangka panjang” (La’bi & Daromes, 2025). “Semakin baik inisiatif *ESG* yang dilakukan perusahaan, semakin besar kemungkinan investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut” (Kholida et al., 2025).

Di sisi lain, menurut Zhang et al. (2026), “perusahaan dengan kinerja *ESG* yang rendah mengungkapkan lebih sedikit atau bahkan memilih untuk tidak melakukan pengungkapan”. “Perusahaan dengan kinerja *ESG* yang buruk, sering kali dipandang sebagai investasi berisiko tinggi (*higher-risk investments*), yang meningkatkan fluktuasi harga saham” (Hu et al., 2023) dalam (Gidage & Bhide, 2025). “Pandangan negatif dari masyarakat, pengawasan regulasi, dan potensi *boycotts* dapat memperburuk reaksi pasar yang berdampak pada fluktuasi harga saham yang signifikan” (Feng et al., 2022) dalam (Gidage & Bhide, 2025). Selain itu, “mengabaikan tanggung jawab *ESG* dapat memicu ketidakpuasan pemangku kepentingan, merusak reputasi, melemahkan (*undermine*) kinerja keuangan, serta dapat membahayakan kelangsungan suatu perusahaan” (Harrison et al., 2015) dalam (Zhang et al., 2026).

Dalam menghitung nilai pengungkapan *ESG*, penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang diterbitkan oleh *GRI*, yaitu *GRI standards* tahun 2016 untuk periode penelitian 2021 dan *GRI standards* tahun 2021 untuk periode penelitian 2022-2024. Menurut Qurniasih et al., (2025), “*ESG disclosure* dapat diukur dengan rumus”:

$$ESG = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkapkan}}{\text{Jumlah indikator yang harus diungkap}} \quad (2.7)$$

“*ESG* merupakan singkatan yang umum digunakan, khususnya dalam konteks *financial markets*. *ESG* singkatan dari lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), *ESG* secara luas digunakan untuk mengarah pada isu-isu keberlanjutan. Salah satu ciri utama dalam *ESG* adalah mengidentifikasi dan menilai berbagai jenis risiko dan peluang yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Selain itu, *ESG* umumnya berfokus pada perspektif dari luar ke dalam, artinya dampak yang ditimbulkan oleh isu-isu keberlanjutan terhadap perusahaan, kinerja keuangannya, dan prospek masa

depan” (Laine & Tregidga, 2025). “Berikut ini kriteria-kriteria *ESG*, yaitu” (Nassos & Avlonas, 2025):

1. “*Environmental Factors*”
 - a. “*Emissions*”
 - b. “*Energy Efficiency*”
 - c. “*Water Usage*”
 - d. “*Waste Production*”
 - e. “*Biodiversity and Ecosystems*”
 - f. “*Environmental Hazards*”
2. “*Social Factors*”
 - a. “*Community and Society*”
 - b. “*Employee Relationships and Labor Standards*”
 - c. “*Customer Relationships*”
 - d. “*Human Rights*”
 - e. “*Poverty and Famine*”
3. “*Governance Factors*”
 - a. “*Ethical Considerations*”
 - b. “*Strategy and Risk Management*”
 - c. “*Inclusiveness*”

2.9 Pengaruh *Environmental Social Governance (ESG) Disclosure* terhadap

Persistensi Laba

Menurut (La’bi & Daromes, 2025), “pengungkapan *environmental social governance (ESG)* dipandang sebagai solusi strategis untuk mewujudkan keberlanjutan bisnis, sekaligus sebagai langkah dalam meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab”. Menurut (Hadro et al., 2022) dalam (Wang et al., 2024), “informasi non-keuangan yang tercantum dalam *ESG* memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memahami

secara sistematis status perusahaan dan potensi pengembangannya di masa depan”. Menurut (Lu et al., 2024) dalam (Wang et al., 2024), “meningkatkan interaksi positif antara perusahaan dan *stakeholders*, serta memupuk kerja sama jangka panjang yang menguntungkan, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan penjualan”.

“Perusahaan yang terbuka dalam praktik *ESG* dianggap lebih disukai oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan. Hal ini dapat memperbaiki reputasi perusahaan, yang berpotensi meningkatkan penjualan” (Febrianti & Parasetya, 2025). Di sisi lain, “perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi *ESG* secara memadai cenderung memiliki tata kelola (*governance*) yang baik, lingkungan (*environment*) yang lebih ramah lingkungan, dan pengembangan berbasis keberlanjutan (*sustainability-based development*) hal ini memberikan keunggulan, seperti fluktuasi laba yang lebih rendah dan akses ke dana yang relatif murah (*relatively cheap funds*)” (Igbinoia & Agbadua, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesimpulan terkait pengaruh *environmental social governance (ESG) disclosure* terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian Wijaya & Wedari (2023), (Wang et al., 2024), Adrina & Pohan (2024) menyatakan bahwa *ESG disclosure* berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Sedangkan menurut Mulchandani et al. (2023) *ESG disclosure* tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Berdasarkan penjelasan mengenai *environmental social governance (ESG) disclosure* dan pengaruhnya terhadap persistensi laba, maka dapat disusun hipotesis ketiga dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₃: *Environmental social governance (ESG) disclosure* berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

2.10 Leverage

“*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan” (Gultom, 2021). Sedangkan, menurut Ross et al. (2024), “*the use of debt in a firm’s capital structure is called financial leverage*” artinya “penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan disebut dengan *leverage* keuangan”. Menurut Hasanuddin et al. (2021), “*leverage* adalah strategi investasi dengan menggunakan dana pinjaman, seperti berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman (*borrowed capital*) untuk meningkatkan potensi keuntungan dari suatu investasi”. “Bagi internal, rasio *leverage* digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan, bagi pihak eksternal rasio *leverage* digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pendanaan atau memberi pinjaman dana” (Wijaya & Suhendah, 2023).

“*Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan *debt to equity ratio (DER)*” (Prasetyo et al., 2021). “*Debt to equity ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan” (Kasmir, 2016) dalam (Buntu, 2023). “Rasio *DER* memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan besarnya risiko yang diambil perusahaan dalam pendanaannya” (Krisnandi et al., 2019) dalam (Auliyah & Saleh, 2024). “*DER* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada pembiayaan utang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan. Di sisi lain, *DER* yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi keuangan yang lebih kuat dan kurang bergantung pada utang” (Auliyah &

Saleh, 2024). “Pendanaan utang memiliki beberapa kelebihan, yaitu” (Weygandt et al., 2022):

1. “*Shareholder control is not affected*”
“Pemegang obligasi tidak memiliki hak suara, sehingga pemilik saat ini (*shareholders*) memegang kendali penuh atas perusahaan”.
2. “*Tax saving result*”
“Bunga obligasi dapat dikurangkan (*deductible*) untuk tujuan perpajakan, sedangkan dividen atas saham (*shares*) tidak dapat dikurangkan atau bukan biaya pengurang pajak”.
3. “*Earnings per share (EPS) may be higher*”
“Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih, namun *EPS* atau laba per saham lebih tinggi pada pendanaan obligasi karena tidak ada tambahan saham yang diterbitkan”.

Menurut Muliana & Ahmad (2021), pendanaan utang juga memiliki kelemahan, “pertama, semakin tinggi rasio utang, semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan. Kedua, jika suatu perusahaan mengalami masa sulit dan laba operasi tidak mampu memenuhi beban bunga, maka para pemegang saham (*shareholders*) harus menanggung kekurangan tersebut. Jika para pemegang saham tidak dapat melakukannya, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan dengan keuntungan dan arus kas yang stabil senantiasa membatasi penggunaan utang”. “Penggunaan utang yang cukup tinggi bagi perusahaan akan meningkatkan risiko perusahaan. Konsekuensi dari utang itu sendiri adalah pembayaran bunga dan risiko kegagalan” (Gunawan & Gurusinga, 2022). “*DER* yang tinggi menunjukkan risiko yang akan dihadapi perusahaan di masa mendatang juga semakin tinggi, seperti risiko kebangkrutan yang banyak dihindari oleh para investor. Biasanya, sebelum berinvestasi investor akan melihat tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Jika tingkat risiko perusahaan tinggi, kepentingan pemegang saham yang ingin berinvestasi akan berkurang” (Yana & Agustiningih, 2022).

Menurut Syafar et al. (2025), “dalam beberapa kasus, perusahaan besar memanfaatkan utang sebagai strategi pendanaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbesar keuntungannya”. Hal tersebut didukung dengan pernyataan menurut Auliyah & Saleh (2024), “tingkat *DER* yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. *DER* yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa perusahaan lebih agresif dalam membiayai pertumbuhannya dengan utang, sehingga bisa meningkatkan *return* bagi pemegang saham tetapi juga meningkatkan risiko keuangan. *DER* yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kredibilitas, stabilitas keuangan, dan profitabilitas perusahaan”.

Di sisi lain, menurut Syafar et al. (2025), “*DER* yang rendah menunjukkan struktur modal yang lebih sehat dan risiko keuangan yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap saham perusahaan”. “Perusahaan dengan *DER* yang rendah cenderung memiliki kredibilitas yang lebih tinggi bagi kreditor dan investor, karena menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada utang” (Auliyah & Saleh, 2024). “Perusahaan dengan tingkat utang yang rendah cenderung lebih tahan terhadap krisis keuangan” (Menggalawati & Hardiningsih, 2024). Menurut Ross et al. (2024), “*debt to equity ratio* dapat diukur dengan rumus”:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \quad (2.8)$$

“*DER* adalah rasio yang mengukur *financial leverage*, jika *DER* lebih dari 1 artinya aset perusahaan lebih banyak dibiayai dengan utang daripada ekuitas, sedangkan jika *DER* kurang dari 1 artinya aset perusahaan lebih banyak yang dibiayai dengan ekuitas daripada utang. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, semakin tinggi juga risiko keuangan perusahaan” (Miller-Nobles et al., 2021). Menurut IAI (2024) dalam PSAK 237, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan

arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik”. Menurut Kieso et al. (2024), “*liability* memiliki tiga ciri utama, yaitu”:

1. “Kewajiban saat ini (*present obligation*)”
2. “Kewajiban yang memerlukan pemindahan sumber daya ekonomi (uang tunai, barang, jasa)”
3. “Kewajiban yang muncul akibat peristiwa masa lalu”.

Utang diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek (*current liabilities*) dan utang jangka panjang (*non-current liabilities*), menurut Weygandt et al. (2022), “*current liabilities* adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana saja yang lebih lama. Sedangkan, utang yang tidak memenuhi kriteria ini adalah *non-current liabilities*”. Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika”:

1. “Entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;”
2. “Entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;”
3. “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
4. “Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggihkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Kieso et al. (2024), “terdapat beberapa jenis utang lancar (*current liabilities*), yaitu”:

1. “*Accounts Payable*”
“*Accounts payable*, atau utang dagang (*trade accounts payable*), adalah saldo utang kepada pihak lain atas barang, persediaan, atau jasa yang telah dibeli dengan rekening terbuka. *Accounts payable* atau utang

usaha muncul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak milik atas aset dan pembayarannya”.

2. “*Notes Payable*”

“*Notes payable* atau utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal spesifik di masa depan. Utang wesel dapat muncul dari transaksi pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya”.

3. “*Current Maturities of Long-term Debt*”

“Perusahaan mengkategorikan sebagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau akan dibayarkan dalam 12 bulan ke depan sebagai *current maturities of long-term debt*”.

4. “*Short-term Obligation Expected to Be Refinanced*”

“*Short-term obligation* atau kewajiban jangka pendek adalah utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasional normal. Beberapa kewajiban jangka panjang diperkirakan akan dibiayai kembali dengan skema jangka panjang”.

5. “*Dividend Payable*”

“*Cash dividend payable* adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada *shareholders* sebagai hasil dari persetujuan Dewan Direksi. Pada tanggal pengumuman (*declaration date*), perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan *shareholders* sebagai kreditor sebesar jumlah dividen yang diumumkan. Karena perusahaan selalu membayarkan dividen tunai dalam waktu satu tahun sejak pengumuman (umumnya dalam waktu tiga bulan), dividen tersebut diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Sedangkan dividen untuk saham preferen tidak diakui sebagai liabilitas sampai Dewan Direksi mengesahkan pembayarannya”.

6. “*Customer Advances and Deposits*”

“Uang jaminan atau *returnable cash deposits* yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan mungkin menerima uang jaminan

dari pelanggan sebagai jaminan atas pelaksanaan kontrak atau jasa. Atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban yang diperkirakan akan timbul di masa depan”.

7. “*Unearned Revenues*”

“*Unearned revenues* merupakan nominal yang dicatat oleh suatu perusahaan ketika menerima pembayaran di muka sebelum menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan (belum direalisasi)”.

8. “*Sales and Value-Added Taxes Payable*”

“*Value-added tax* atau Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan pada suatu produk atau jasa setiap kali terjadi penambahan nilai pada tahap produksi maupun pada saat penjualan akhir. PPN merupakan beban bagi pengguna terakhir yang umumnya adalah individu, sifatnya mirip dengan pajak penjualan (*sales tax*). Pajak penjualan hanya dikenakan sekali pada saat konsumen melakukan pembelian, sehingga tidak ada pihak lain dalam rantai produksi atau pasokan yang terlibat dalam pemungutan pajak tersebut”.

9. “*Income Taxes Payable*”

“*Income taxes payable* bervariasi sesuai dengan besarnya pendapatan tahunan (*annual income*). Perusahaan harus mengklasifikasikan pajak yang harus dibayar atas laba bersih yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan pajak, sebagai liabilitas lancar”.

10. “*Employee-Related Liabilities*”

“Perusahaan mencatat jumlah terutang kepada karyawan berupa gaji atau upah pada akhir periode akuntansi sebagai utang lancar. Selain itu, perusahaan juga sering mencatat pos-pos berikut yang berkaitan dengan kompensasi karyawan sebagai liabilitas lancar”:

- 1) “*Payroll Deductions*”
- 2) “*Compensated Absences*”
- 3) “*Bonuses*”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*non-current liabilities* atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam

waktu lebih dari satu tahun di masa mendatang”. “Contoh yang paling umum adalah utang obligasi, utang wesel, pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Secara umum, liabilitas jangka panjang memiliki tiga jenis” (Kieso et al., 2024):

1. “Kewajiban yang timbul dari peristiwa pendanaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan utang wesel jangka panjang”
2. “Kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan”
3. “Kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk menentukan jumlah yang harus dibayar, pihak yang menerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jaminan layanan atau produk, liabilitas lingkungan, dan restrukturisasi yang disebut sebagai provisi”.

“Aset suatu perusahaan terdiri dari klaim pihak kreditor atau pemegang saham. Total aset dikurangi dengan klaim kreditor (kewajiban) merupakan bagian dari pemegang saham atas aset, yaitu ekuitas. *Equity* atau ekuitas secara umum terdiri dari” (Weygandt et al., 2022):

1. “*Share Capital-Ordinary*”
“*Share Capital-Ordinary* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang telah dibayar oleh *shareholders* atas saham biasa yang mereka beli”.
2. “*Retained Earnings*”
“*Retained Earnings* ditentukan oleh tiga komponen, yaitu”:
 - a. “*Revenues*”
“*Revenues* atau pendapatan adalah kenaikan ekuitas bruto yang muncul dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan (*income*)”.
 - b. “*Expenses*”

“*Expenses* adalah biaya atas aset yang terpakai atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban merupakan penurunan ekuitas yang muncul akibat kegiatan operasional usaha”.

c. “*Dividends*”

“*Dividends* adalah pembagian uang tunai atau aset lain kepada pemegang saham, nilainya mengurangi saldo laba (*retained earnings*), namun bukan sebagai beban (*expenses*)”

2.11 Pengaruh *Leverage* terhadap Persistensi Laba

“Rasio *leverage* merupakan informasi yang diperlukan oleh kreditor atau pemberi pinjaman. Dengan mengetahui rasio *leverage*, kreditor dapat menentukan seberapa tinggi risiko utang perusahaan” (Hasanuddin et al., 2021). “Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pihak eksternal, dengan kemampuan yang digambarkan oleh modal atau aset yang dimilikinya” (Prasetyo et al., 2021). “Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi mengalami risiko kerugian yang besar karena total utang yang dimiliki besar” (Erawati & Wahyuni, 2019) dalam (Partiwi & Herawati, 2022).

“Tingkat utang yang tinggi diikuti oleh laba yang tidak berkelanjutan (*persistently poor*) dapat menjadi tanda peringatan. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa bisnis sedang menghadapi kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang stabil” (Manggalawati & Hardiningsih, 2024). “Sebelum mengalami kebangkrutan terdapat tanda-tanda awal, yaitu kegagalan ekonomi dan bisnis serta kebangkrutan teknis (*technical insolvency*). Kedua hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional, termasuk biaya modal dan tidak mampu melanjutkan kegiatan operasional. *Technical insolvency* menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sehingga, masalah tersebut dapat menjadi hambatan dan harus

dihindari agar mampu membangun *earnings persistence*” (Brealey et al., 2020) dalam (Setiana & Hadianto, 2023).

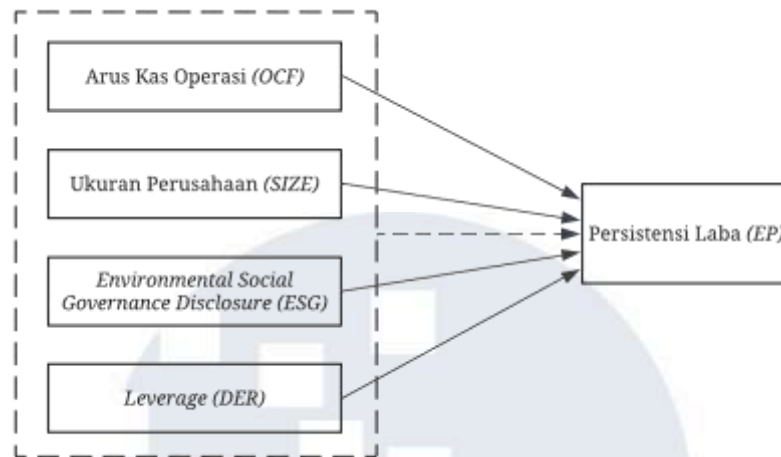
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesimpulan terkait pengaruh *leverage* terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian Setiana & Hadianto (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Sedangkan, hasil penelitian oleh Hasanuddin et al. (2021), Sabila et al. (2021), dan Fillio & Diana (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Berdasarkan penjelasan mengenai *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity (DER)* dan pengaruhnya terhadap persistensi laba, maka dapat disusun hipotesis keempat dalam penelitian sebagai berikut:

Ha4: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

2.12 Pengaruh Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, *Environmental Sustainability Disclosure*, dan *Leverage* secara Simultan terhadap Persistensi Laba

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait uji pengaruh arus kas operasi, ukuran perusahaan, *environmental sustainability disclosure*, dan *leverage* terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdillah et al. (2021), “secara simultan, variabel arus kas operasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba”. Hasil penelitian Prasetyo et al. (2021), “*company value, leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba”. Hasil penelitian Astuti & Damayanty (2024), “*operating cash flow, debt level*, dan *firm size* berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba”. Hasil penelitian Fillio & Diana (2024), “*company size, operating cash flow, ownership structure*, dan *debt level* berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba”. Hasil penelitian Adrina & Pohan (2024), “pengungkapan *sustainability report (sustainability disclosure), green accounting*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (persistensi laba)”.

2.13 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Model Penelitian